



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 09/Siaran Pers/AL/LI.04.01/4/2019

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 4 April 2019

KY-PUSaKO Jalin Konsolidasi Pengawasan Hakim

Padang (Komisi Yudisial) - Dalam menjalankan wewenang dan tugas untuk melakukan pengawasan hakim, Komisi Yudisial (KY) membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu bentuknya adalah dengan melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Terkait pengawasan hakim, KY mendorong terwujudnya akuntabilitas peradilan. Dalam praktik peradilan modern, konsep independensi harus disertai akuntabilitas peradilan sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik. Hal itu juga dilakukan KY dalam mendorong akuntabilitas peradilan di proses peradilan pemilihan umum (pemilu).

KY bekerja sama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas menggelar workshop “Peran Komisi Yudisial dan Masyarakat dalam Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Perilaku Hakim”, Kamis (4/4) di Universitas Andalas, Padang.

Desk Pemilu KY

Dalam kesempatan itu, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta menjelaskan Desk Pemilu sebagai wujud komitmen KY dalam mendorong terwujudnya Pemilu 2019 yang bersih dan adil. KY membentuk Desk Pemilu karena perkara pemilu memiliki potensi menimbulkan gejolak dan gesekan sosial. Pengadilan menjadi gerbang penentu dalam menangani gesekan tersebut.

KY akan melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu di pengadilan, pengawasan hakim yang menangani perkara pemilu, serta mengambil langkah advokasi terhadap hakim yang direndahkan keluhuran martabatnya selama menjalankan tugasnya dalam menangani perkara pemilu.

Dalam melakukan pemantauan persidangan perkara-perkara pemilu, KY akan melibatkan Penghubung di 12 provinsi dan jejaring KY di seluruh Indonesia. Untuk pengawasan hakim, KY berfokus pada laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran KEPPH dalam mengadili perkara pemilu, sementara advokasi hakim untuk mencegah dan menangani perbuatan yang merendahkan keluhuran dan martabat hakim.

Sukma Violetta

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id

email: humas@komisiyudisial.go.id